

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2009), pengelolaan keuangan daerah yang efektif harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pencairan dana, yang harus berjalan secara efektif, efisien, dan transparan.

Namun, dalam praktiknya, proses pencairan dana sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk keterlambatan administrasi, prosedur manual yang kompleks, serta kurangnya integrasi sistem informasi yang mendukung. Misalnya, di Kabupaten Kutai Timur, pencairan dana mengalami hambatan akibat masalah teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri ini sering mengalami kelambatan, khususnya dalam mengakses data untuk pencairan dana kegiatan, sehingga menghambat kinerja perangkat daerah (*Kaltimnyapa, 2025*).

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa selain faktor teknis, aspek perencanaan dan disiplin administrasi juga memainkan peran penting dalam kelancaran proses pencairan dana di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan

disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan untuk mengatasi permasalahan ini.

Menurut Alter (2002), sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Bertalanffy (1968) mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sistem pencairan dana merujuk pada prosedur, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola aliran dana dari kas daerah ke pihak yang berhak menerimanya. Sistem ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi dalam sistem pencairan dana menjadi kebutuhan yang mendesak. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2023) menyoroti pentingnya penerapan sistem berbasis web untuk memantau realisasi anggaran daerah secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dikemukakan oleh O'Brien (2005), yang menyatakan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan melalui akses data yang cepat dan akurat. Selain itu, penelitian dari Aulia (2024) menekankan perlunya integrasi Sistem Perintah Pembayaran Dana (SP2D) guna meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses pencairan dana. Hal ini selaras dengan konsep *Business Process Reengineering* (BPR) oleh Hammer dan Champy (1993), yang menekankan perlunya perancangan

ulang proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan secara signifikan.

Selain permasalahan prosedural, faktor penerimaan teknologi juga menjadi aspek penting dalam implementasi sistem pencairan dana berbasis digital. Menurut Davis (1989) dalam *Teori Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan teknologi baru bergantung pada persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Penerapan sistem keuangan elektronik di BPKAD dapat mempercepat proses pencairan dana, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Lebih lanjut, teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) oleh Venkatesh et al. (2003) menjelaskan bahwa ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan dukungan institusional berpengaruh terhadap tingkat adopsi teknologi dalam organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pencairan dana di BPKAD Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta implementasinya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pencairan dana dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian, “Analisis Sistematis Penarikan Dana di BPKAD Kota Pekalongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Implementasinya di Lapangan,” guna mengevaluasi sejauh

mana regulasi yang berlaku telah diterapkan dalam proses penarikan dana serta menilai efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya di lapangan.

1.2 Ruang Lingkup

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam mengelola pencairan dana untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan daerah. Proses pencairan dana ini harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kepatuhan proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada beberapa permasalahan berikut:

1. Sistematisasi pencairan dana yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan.
2. Sistematisasi pencairan dana di BPKAD perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan pencairan dana di BPKAD, terdapat berbagai kendala yang perlu diidentifikasi dan dianalisis.
4. Rekomendasi diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap sistem pencairan dana yang diterapkan oleh BPKAD.

1.3 Tujuan Penulisan

Diharapkan bahwa laporan tugas akhir ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak terkait dan pembaca. Penulis mendapati nilai penting dalam menyusun laporan tugas akhir ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis sistematika pencairan dana yang dilakukan oleh BPKAD
2. Mengidentifikasi kesesuaian prosedur antara proses pencairan dana di BPKAD dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Mengungkap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencairan dana di BPKAD
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam proses pencairan dana di BPKAD

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis diharapkan bahwa laporan tugas akhir ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak terkait dan pembaca. Penulis mendapati nilai-nilai penting dalam menyusun laporan tugas akhir ini, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca:

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam hal sistematika pencairan dana, serta memberikan gambaran mengenai penerapan peraturan keuangan dalam praktik di pemerintahan daerah.

2. Bagi Instansi :

- a. Bagi BPKAD :

Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam proses pencairan dana.

b. Bagi Pemerintah Daerah :

Mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

3. Bagi Akademis :

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, atau pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik serupa di bidang keuangan daerah, khususnya terkait implementasi kebijakan keuangan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penyusunan untuk Tugas Akhir ini dibagi menjadi empat bab untuk mempermudah dalam penyusunannya yang terdiri dari bagian sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan.

2. BAB II PROFIL INSTANSI

Berisi deskripsi mengenai Badan Pen Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), meliputi :

- a. Sejarah berdirinya BPKAD.
- b. Struktur organisasi BPKAD.
- c. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab BPKAD.
- d. Proses kerja umum di BPKAD, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pencairan dana.

3. BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk:

- a. Tinjauan Teori.
- b. Tinjauan Praktik.
- c. Perbedaan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait sistematika pencairan dana, kesesuaiannya dengan regulasi, dan kendala yang ditemukan.

Saran untuk perbaikan proses pencairan dana di BPKAD dan implikasi penelitian.